

Pendekatan Kelembagaan: Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Literasi

Neneng Yani Yuningsih¹, Salsabila², Susi Yulianti³

¹Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP UNPAD, Indonesia

²Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD, Indonesia

³Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD, Indonesia

Email: neneng.yani@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya tingkat literasi Indonesia yang disebabkan rendahnya minat baca, kurangnya akses bahan bacaan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi. Sementara Tujuan tulisan ini untuk menjelaskan upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan literasi siswa berusia 15 tahun dalam kemampuan membaca, matematika dan sains dengan mempergunakan pendekatan kelembagaan yang berfokus pada dua karakteristik, yaitu karakteristik legal formal dan karakteristik metode *historical comparative*. Metode riset mempergunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Penentuan informan mempergunakan teknik *purposive*. Hasil riset ini menunjukkan bahwa berdasarkan dimensi kelembagaan, Pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang mengatur sistem pendidikan nasional, perpustakaan, perbukuan, dan bahasa. Pemerintah Indonesia juga memiliki program literasi dalam lingkup sekolah, lingkup masyarakat, dan lingkup keluarga. Implikasi penelitian ini dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi serta program-program pemerintah tentang literasi, selain itu juga dapat meningkatkan kesadaran baik pemerintah maupun masyarakat tentang dampak literasi terhadap kualitas Pendidikan.

Kata Kunci: Kelembagaan; Kebijakan, Literasi; Regulasi, Pemerintah

Institutional Approach: Indonesian Government's Efforts to Improve Literacy

Abstract

His research is motivated by Indonesia's low literacy level due to low interest in reading, lack of access to reading materials, and lack of awareness of the importance of literacy. Meanwhile, the purpose of this paper is to explain the Indonesian government's efforts to improve the literacy of 15-year-old students in reading, science and math by using an institutional approach that focuses on two characteristics, namely formal legal characteristics and historical comparative method characteristics. The research method uses a qualitative approach. Data collection techniques were literature review, interviews and observation. Determination of informants using purposive technique. The results of this study show that based on the institutional dimension, the Indonesian government has regulations governing the national education system, libraries, books and languages. The Indonesian government also has literacy programs within schools, communities and families. The implication of this study is that it can improve the quality of policies and regulations as well as government programs on literacy. It can also increase the awareness of both the community and the government about the impact of literacy on the quality of education.

Keywords: Institutionalisation; Policy, Literacy; Regulation, Government



PENDAHULUAN

Seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, individu kini dituntut untuk dengan cepat menguasai teknologi dari berbagai ilmu pengetahuan. Untuk dapat menguasainya perlu adanya kemampuan yang memadai dalam literasi. Secara tidak langsung, literasi berperan penting dalam kemajuan pendidikan suatu negara. Berjalannya proses pendidikan melibatkan aktivitas literasi di dalamnya. Jika proses pendidikan terhambat, maka makin sedikit terbentuknya sumber daya manusia yang baik dan tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap berbagai aspek suatu negara seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dalam persaingan global pun, literasi sangat mempengaruhi daya saing suatu bangsa. Dengan literasi, masyarakat akan lebih bisa bernalar, berpengetahuan, dan berpikir kritis. Literasi membuka peluang masyarakat untuk memperkaya pengetahuan.

Berbicara mengenai literasi, banyak ahli yang telah mendefinisikannya (Harris and Hodges, 1996). Departemen Victoria School Education dengan Catholic Education Office Victoria mengemukakan bahwa literasi sangat sulit untuk didefinisikan karena sesungguhnya literasi merupakan konstruksi sosial dan

gagasan kompleks yang bisa saja memiliki definisi berbeda-beda bagi kelompok budaya dan waktu tertentu. Oleh karena itu, literasi relatif dinamis. Walaupun literasi secara umum didefinisikan sebagai menulis dan membaca, literasi merupakan hal kompleks yang mencakup proses keterampilan berbahasa dan berpikir yang terintegrasi. OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) untuk PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional) pun mendefinisikan literasi sebagai aktivitas yang berkaitan dengan tulis-menulis. Menurut OECD (2001) literasi merupakan kemampuan untuk memahami, mempergunakan, dan membuat refleksi teks tertulis dalam meraih sasaran seseorang serta memperkaya wawasan dan potensinya yang kemudian digunakan untuk secara efektif berpartisipasi dalam masyarakat. (dalam Syahrin, 2021)

UNESCO (2023) mengemukakan bahwa di luar konsep konvensional sebagai satu perangkat keterampilan menulis, membaca, dan berhitung—literasi sekarang ini diartikan sebagai sarana pemahaman, interpretasi, kreasi, identifikasi, dan interaksi di dunia yang semakin digital, semakin cepat dan kaya informasi. Literasi juga dapat diartikan dengan peka terhadap lingkungan sekitar dan berpikir kritis, melekat



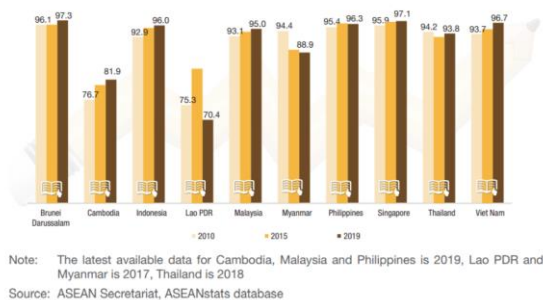
teknologi, dan melek politik. Hal ini sejalan dengan pendapat Kirsch dan Jungleblutuang memaknai literasi sebagai keterampilan individu untuk mengolah informasi untuk berkontribusi terhadap pengetahuan agar dapat bermanfaat untuk masyarakat (dalam Irianto dan Febrianti, 2016). Oleh karenanya, Wells (dalam Agustina 2021) membagi tingkat literasi menjadi empat poin antara lain: 1). *Performative*; 2). *Functional*; 3). *Informational*; 4). *Epistemic*.

Macam-macam literasi pun kini kian berkembang antara lain literasi kesehatan, literasi data, literasi finansial, literasi teknologi, literasi kritis, literasi statistik, dan literasi informasi. Literasi merupakan akar dari berbagai proses pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat krusial untuk pembangunan suatu negara atau bangsa, manusia menjadi seseorang yang lebih baik untuk melaksanakan kehidupan dirinya di mana kehidupan seorang individu melingkupi berbudaya (*civilized*) dan kedewasaan (Herdiansyah, 2020).

Selain pentingnya literasi sebagai bagian dari hak atas pendidikan, literasi juga menambah taraf kehidupan dengan meningkatkan kapasitas yang kemudian pada akhirnya meningkatkan partisipasi dalam pasar tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, serta pembangunan berkelanjutan dan

berdampak baik terhadap kesehatan. (Faizah; 2016)

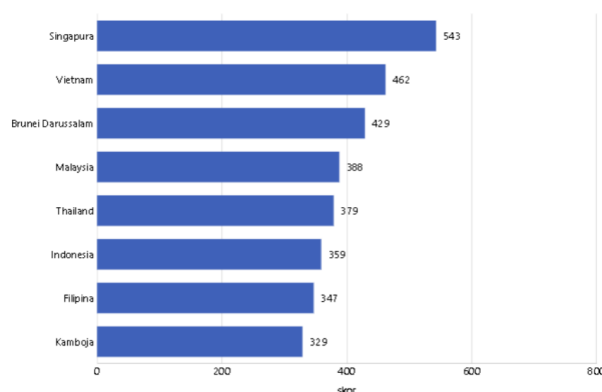
Di bawah ini disajikan data tingkat literasi masyarakat dewasa (*adult literacy rates*) di Asia Tenggara yang dilansir dari ASEAN *Key Figures* dalam rentang waktu 2010—2020.



Gambar 1. Literasi Masyarakat Dewasa Negara ASEAN 2010-2020

Skor *reading performance* (kemampuan membaca pelajar) pelajar Indonesia termasuk kurang di skala ASEAN. Perihal ini tergambar dari laporan penilaian kapasitas atau *Programme for International Student Assessment* (PISA) atau pelajar internasional tahun 2022 yang diterbitkan OECD. PISA melaksanakan survei dan tes terhadap sampel pelajar dengan usia 15 tahun dari berbagai negara. Pelajar Indonesia pada 2022 mendapat skor kapasitas membaca 359 poin, nilai ini kurang dari rerata negara anggota OECD yang berkisar 472 sampai 480 poin. Skor ini juga lebih kecil daripada lima negara tetangga di ASEAN.





Gambar 2. Hasil Survei PISA 2022:
Kemampuan Membaca (Literasi) Pelajar
di ASEAN

Kualitas dari literasi menentukan kualitas daripada pendidikan suatu negara Indonesia menduduki peringkat kelima dengan indeks pendidikan sebesar 0,603 (Welle, 2017). Perihal ini memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia di tingkat ASEAN berada pada posisi yang memprihatinkan.

Jika kita berbicara mengenai tingkat literasi di Indonesia, kondisinya begitu memprihatinkan. OECD melaksanakan PISA atau Program Penilaian Pelajar Internasional yang terdiri atas tiga aspek antara lain membaca (literasi), sains, dan matematika. Terdapat sekitar 14.000 siswa yang terlibat pada penilaian PISA dan sampel penilaiannya dipilih secara acak oleh OECD. Pada 2009 menunjukkan bahwa Indonesia ada dalam posisi ke-57 dari 65 negara dalam bidang literasi dengan skor 402. Tiga

tahun berikutnya, tingkat literasi Indonesia tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Peringkat literasi Indonesia yang tadinya ke-57 dari 65 negara menurun menjadi 60 dari 65 negara dengan skor 396. Kemudian pada tahun 2015, negara partisipan PISA bertambah sebanyak tujuh negara. Namun, hal ini tidak menjadikan peringkat tingkat literasi Indonesia meningkat secara signifikan. Tatkala itu, skor literasi Indonesia sebesar 397. Hanya meningkat satu poin dari skor literasi sebelumnya. Pada 2018, angka literasi Indonesia menurut PISA menurun, dengan skor sebesar 371. Kemudian data terbaru skor PISA Indonesia dalam bidang literasi pada tahun 2022 menunjukkan penurunan kembali dengan skor sebesar 359. Salah satu faktor penurunan skor PISA Indonesia di bidang literasi adalah adanya Pandemi Covid-19.

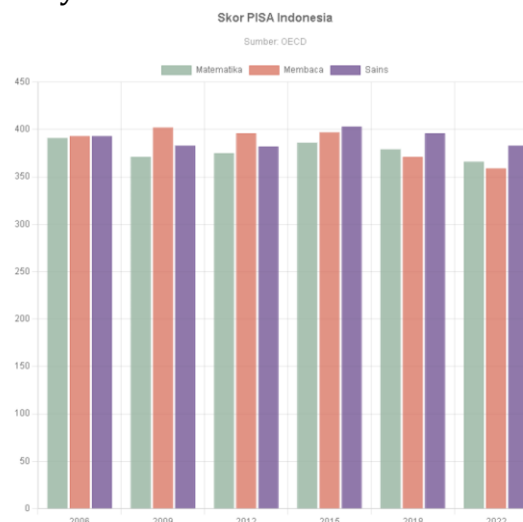


Diagram 1. Skor PISA Indonesia Tahun
2006 s.d. 2022

Selaras dengan survei yang pernah dilaksanakan oleh PISA, tajuk *World's Most Literate Nations Central* dari *Connecticut State University* pada tahun 2016, Indonesia menempati posisi ke-60 dari 61 negara mengenai tingkat literasi (Miller, 2016). Indonesia sedang dalam situasi “darurat literasi”. Dampaknya jika Indonesia masih terus-menerus menyandang darurat literasi, Indonesia akan makin tertinggal dari negara-negara maju.

Untuk membangun budaya literasi masyarakat, terdapat beberapa regulasi yang diterbitkan pemerintah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 48,
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan pasal 1 ayat 4 dan pasal 36,
3. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 74,
4. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 5,
5. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti bagian VI,

6. Panduan Gerakan Literasi
Nasional tahun 2017.

Berdasarkan beberapa regulasi yang mengatur mengenai literasi, pada intinya pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi literasi dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca yang dilaksanakan dengan :

1. sebagai proses pembelajaran melaksanakan pemanfaatan dan pengembangan perpustakaan;
2. gerakan nasional gemar membaca;
3. penyediaan buku berkualitas dan murah;
4. menyediakan fasilitas perpustakaan di fasilitas umum yang mudah diakses, bermutu, dan murah;
5. rumah baca;
6. taman membaca; dan/atau
7. aktivitas yang serupa lainnya.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 pun memberikan amanat sebelum pembelajaran sekolah memiliki kewajiban melaksanakan aktivitas membaca dengan waktu 15 menit (Kemendikbud, 2015). Pemerintah juga mengembangkan sebuah program bernama Gerakan Literasi Nasional. Gerakan ini adalah suatu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di abad ke-21 dengan penguatan pengetahuan, pemahaman, dan



keterampilan yang diperlukan dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia. Gerakan Literasi Nasional menyusun enam jenis literasi yakni literasi sains, literasi baca tulis, literasi kewargaan, literasi numerasi, literasi keuangan, dan literasi digital. Keenam jenis literasi ini sebagai suatu gerakan, disusun dengan tiga aspek, yakni sekolah (Gerakan Literasi Sekolah), masyarakat (Gerakan Literasi Masyarakat) dan keluarga (Gerakan Literasi Keluarga), (Anggraini; 2019).

Gerakan Literasi Nasional secara umum bertujuan untuk menerapkan dan merealisasikan budaya literasi mulai dari lingkup masyarakat, sekolah, dan keluarga pada ekosistem pendidikan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas hidup. Prinsip-prinsip dari Gerakan Literasi Nasional antara lain terintegrasi, berkesinambungan, dan melibatkan seluruh pemangku kebijakan. Salah satu praktik yang telah dilakukan pemerintah melalui program Gerakan Literasi Nasional adalah pendistribusian buku ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) di NTT (Nusa Tenggara Timur) dan NTB (Nusa Tenggara Barat) untuk jenjang PAUD dan SD yang dimulai pada Tahun 2021. Pemberian akses terhadap buku-buku yang berkualitas merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun fokus masalah yang dibahas dalam naskah ini mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Sementara lingkup kasusnya secara nasional dengan unit analisis Kemendikbud.

Berbeda dengan penelitian sejenis lainnya yang dilakukan peneliti Indonesia yang lebih banyak berfokus pada tingkat literasinya, sementara penelitian asing banyak berfokus pada studi perbandingan seperti penelitian dengan "*Literacy Policy in Southeast Asia: A Comparative Study between Singapore, Malaysia, and Indonesia*" menjelaskan perbandingan kebijakan literasi di ketiga negara Asia Tenggara (Rusydian, Tamin, Rahman; 2023). Penelitian ini menggunakan konsep tingkat literasi menurut Wells (1987), yakni *performative, functional, informative*, dan *epistemic*. Sementara berbeda dengan bahasan dalam tulisan ini yang mengkaji pada perspektif pemerintah yaitu upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan literasi dengan menggunakan pendekatan kelembagaan.

Secara konseptual pendekatan kelembagaan merupakan salah satu pilar Ilmu Politik yang paling tua, juga dikenal sebagai pendekatan institusional. Pendekatan ini merupakan metode pertama yang digunakan dalam dunia politik untuk menganalisis lembaga-



lembaga dalam bernegara. Fokus utama adalah relasi antarlembaga negara. Pendekatan ini sangat formal dan deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai lembaga pemerintah dan jalur demokrasi yang telah ada. Eksistensi Lembaga-lembaga ini mengatur tata kelola negara dengan mekanisme pemerintahan.

Pendekatan kelembagaan bersifat deskriptif dan menjelaskan bagaimana lembaga pemerintah bekerja dan bagaimana fungsinya. Kavanagh dalam Mariana et al (2007) merumuskan tiga karakteristik utama dari pendekatan kelembagaan:

- a). Deskriptif Induktif; mengemukakan bahwa pendekatan ini menggambarkan dan menganalisis fenomena pemerintahan modern/kontemporer.
- b) Formal Legal; Disebut legal karena melibatkan hukum public, lalu disebut formal karena mempelajari cara pemerintah berfungsi. Hal ini memang tertuang dalam konstitusi dokumentari klasik. Salah satu karakteristik utamanya yang menjadi kekurangan adalah hal ini mengabaikan adanya hukum informal yang tidak tertulis dan seringkali menggunakan acuan yang sudah ada.
- c) Metode *Historical Comparative*; Pendekatan ini menggunakan metode *historical comparative*. Menurut Wilson dalam Mariana et al (2007), metode ini membuat setiap

negara mengetahui dirinya sendiri dengan mendeskripsikan, meninjau, dan membandingkan fenomena pemerintahan di masa lalu secara sistematis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, dengan waktu penelitian dari Bulan November 2023 sampai dengan September 2024. Adapun lokasi penelitian di Indonesia khususnya di Kemendikbud Republik Indonesia.

Target/Subjek Penelitian

Teknik penetapan informan yang dipergunakan yaitu *purposive*. Adapun informan yang ditentukan adalah Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek dan Anggota KKLP (Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional) Literasi Badan Pengembangan serta Widyabasa Ahli Muda Balai Bahasa Jawa Barat; Direktur Yayasan Literasi Anak Indonesia (YLAI); Koordinator Senior Program Perpustakaan Ramah Anak YLAI; *Senior Teacher Trainer* YLAI; *Resource Development Coordinator* YLAI; Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM).

Prosedur Penelitian

Proses pelaksanaan penelitian dimulai dengan melakukan studi pustaka terhadap regulasi, jurnal dan dokumen relevan guna membangun dasar konseptual. Selanjutnya peneliti melakukan studi lapangan dengan wawancara mendalam dan observasi



dengan narasumber. Prosedur ini memungkinkan peneliti agar dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta dinamika kelembagaan dalam meningkatkan literasi di Indonesia.

Data Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data instrumen berasal dari data primer yang didapatkan dengan pengamatan langsung dan wawancara mendalam serta data sekunder didapat dari studi pustaka berupa regulasi, jurnal, buku, dan dokumen relevan lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yaitu: *Pertama*, melaksanakan studi pustaka, proses penelitian dari telaah literatur berupa aturan undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkorelasi dengan permasalahan. *Kedua*, peneliti melaksanakan studi lapangan, yakni mengumpulkan dan menyeleksi data yang didapat dari lokasi penelitian

Teknik Analisis Data

Teknis analisa data yang dilaksanakan pada penelitian ini: 1). *Data Reduction*; 2). *Data Display*; 3). *Conclusion Drawing/Verification*;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Kelembagaan Pemerintah Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Literasi Masyarakat

Pendekatan kelembagaan acapkali bersifat normatif, yakni sesuai dengan standar atau ideal. Menyandarkan pada pandangan ini, negara dimaknai sebagai

a body of formal constitutional norms (suatu badan norma-norma konstitusional yang formal). Menurut Kavanagh dalam Mariana et al (2007) terdapat tiga karakteristik utama dari pendekatan kelembagaan:

- a). Deskriptif Induktif;
- b) Formal Legal;
- c) Metode *Historical Comparative*

Dalam analisis tentang upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan literasi hanya akan menggunakan dua karakteristik yaitu formal legal dan metode *historical comparative*. Sementara terkait dengan deskriptif induktif tidak menjadi bahasan sehubungan sudah termaktub di dalam analisis formal legal dan metode *historical comparative*. Dimana secara teori deskriptif induktif menggambarkan tentang formulasi hukum dan fenomena politik yang menjelaskan peristiwa dari masa lalu tentang dirinya sendiri.

A. Legal Formal Regulasi Literasi di Indonesia

Sebelum menelisik lebih jauh mengenai regulasi yang berperan sebagai payung hukum bagi upaya literasi di Indonesia, penting untuk meninjau regulasi mengenai pendidikan. Mengingat pendidikan merupakan induk dari literasi itu sendiri. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan entitas penting untuk menguatkan kapasitas sumber daya manusia sebuah bangsa. Maka dari itu, pemerintah merumuskan sebuah produk hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan



Nasional merupakan pendidikan yang dilandasi dari Pancasila dan UUD Tahun 1945 yang akarnya dari nilai-nilai agama, budaya, dan responsif atas tuntutan zaman. Secara tegas, Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan:

- (1) Pendidikan adalah upaya terencana dan sadar dalam mengembangkan proses belajar dan iklim pembelajaran agar secara aktif siswa dapat menguatkan potensinya agar memiliki akhlak mulia, kepribadian baik, kemampuan pengendalian diri, kecerdasan, spiritual keagamaan, serta kemampuan yang diperlukan diri mereka, masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Pendidikan nasional yaitu pendidikan yang berlandaskan UUD Tahun 1945 dan Pancasila yang fundamental terhadap kebudayaan nasional Indonesia, nilai-nilai agama, dan tanggap atas tuntutan perkembangan zaman.

Masuk kepada konteks literasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mulai menyinggung aspek literasi pada pasal 4 ayat (5) yang menjelaskan bahwa Pendidikan dilaksanakan dengan menyusun budaya menulis, berhitung, dan membaca untuk semua lapisan. Kalimat dalam pasal ini dapat dikatakan aspek literasi karena merujuk pada definisi konvensional literasi yang diartikan sebagai seperangkat keterampilan membaca, menulis, dan

berhitung (UNESCO, 2023). Namun, memang pada 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal hanya bersifat menyinggung aktivitas literasi saja seperti membaca, menulis, dan berhitung serta tidak menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi.

Maka dari itu, di Tahun 2007 pemerintah mengesahkan regulasi yang lebih menjelaskan secara rinci bagaimana meningkatkan literasi masyarakat dengan cara menumbuhkan pembudayaan gemar membaca. Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Perpustakaan merupakan aspek penting dalam literasi karena berperan sebagai media dalam mendorong pembudayaan gemar membaca. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 48 secara tegas menjelaskan:

- (1) Pengembangan budaya gemar membaca dilaksanakan dengan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pengembangan budaya gemar membaca di keluarga disediakan pemerintah daerah dan pusat dengan buku berkualitas serta murah.
- (3) Pengembangan budaya gemar membaca di satuan pendidikan sebagai proses pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengembangkan perpustakaan.
- (4) Pengembangan budaya gemar membaca di masyarakat seperti ayat (1) dilaksanakan dengan



menyediakan sarana perpustakaan di beberapa sarana publik yang mudah dijangkau, bermutu, dan murah.

Selain perpustakaan sebagai tempat membaca dan proses pembelajaran, pemerintah juga perlu menumbuhkan pembudayaan kegemaran membaca dengan memberikan fasilitas buku berkualitas dan murah.

Lebih lanjut, Pemerintah mengesahkan PP Nomor 24 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Di dalam PP ini dijelaskan kembali secara lebih rinci standarisasi perpustakaan. Terkhusus dalam hal pembudayaan kegemaran membaca, tertulis secara tegas pada Pasal 74 yang menyatakan:

(1) Pengembangan gemar membaca dilaksanakan dengan :

- a. penyediaan buku terjangkau dan bermutu;
- b. gerakan nasional gemar membaca;
- c. sebagai langkah pembelajaran dilalui pemanfaatan dan pengembangan perpustakaan;
- d. menyediakan fasilitas perpustakaan di sarana publik yang mudah diakses, bermutu, dan terjangkau;
- e. taman membaca;
- f. rumah baca; dan/atau
- g. aktivitas serupa lainnya.

(2) Pengembangan budaya gemar membaca dilaksanakan oleh

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(3) Keberhasilan masyarakat dalam melaksanakan gerakan pengembangan budaya gemar membaca diberi penghargaan oleh pemerintah daerah dan Pemerintah pusat.

Hal menarik yang dapat ditinjau dari PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 ini ialah bahwa selain perpustakaan, terdapat pula taman bacaan masyarakat maupun rumah baca sebagai sarana membaca.

Selaras dengan beberapa undang-undang sebelumnya, terdapat juga Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017. Peraturan ini lahir dilatarbelakangi bahwa buku juga merupakan suatu sarana membangun dan menambah budaya literasi masyarakat untuk meningkatkan peranan masyarakat di dunia internasional. Berbeda dengan beberapa undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan ini mendefinisikan arti dari literasi pada pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa Literasi merupakan kemampuan secara kritis dalam memberikan makna pada informasi sehingga semua orang dapat mendapatkan akses teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai usaha untuk menambah kualitas hidup mereka.

Terlihat bahwa pendefinisian literasi dalam undang-undang ini sudah mulai berkembang dengan tidak mengartikan literasi sekadar aktivitas baca-tulis saja. Lebih daripada itu,

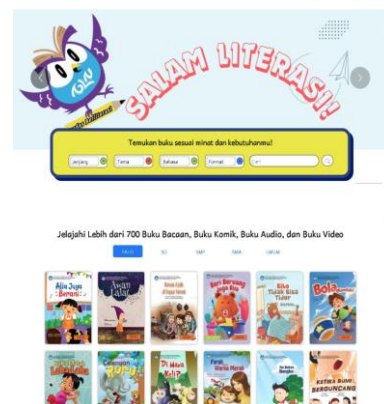


literasi juga kemampuan memberikan makna secara kritis informasi sehingga seluruh orang mendapat akses ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sebagai usaha individu untuk menambah taraf hidup mereka. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 pasal 36 memperjelas bahwa pemerintah pusat berkewajiban memfasilitasi buku murah dan berkualitas secara merata dan tanpa diskriminasi,

Dapat dilihat bahwa pasal 36 ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat perlu memfasilitasi penyediaan buku murah berkualitas dengan catatan penyelenggaraan buku murah bermutu tersebut harus diselenggarakan secara merata dan tanpa diskriminasi. Selain itu, terdapat hal menarik dalam pasal ini, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 pasal 36 juga menaruh fokus bahwa pemerintah pusat perlu memfasilitasi kebudayaan nasional dengan buku, memberikan fasilitas buku dengan bahasa asing untuk upaya dapat menambah ilmu pengetahuan, dan menerbitkan buku yang mengandung nilai sejarah. Dengan adanya buku berbahasa asing, hal ini akan lebih membuka cakrawala ilmu pengetahuan secara lebih luas.

Masih dalam peraturan yang sama, penyediaan buku murah dan bermutu tidak hanya berupa buku cetak, tetapi juga pemerintah pusat perlu melakukan pengembangan buku elektronik agar masyarakat bisa mengakses buku di mana saja dan kapan saja serta dengan lebih mudah didapatkan. Perihal ini pasti

terjadi beriringan dengan perkembangan zaman. Pengembangan buku elektronik tersebut termaktub dalam pasal 57. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi dengan lembaga Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencanangkan buku elektronik melalui website bernama Budi (Buku Digital) Kemdikbud.



Gambar 6. Budi Kemdikbud

Website Budi Kemdikbud ini merupakan layanan perpustakaan daring yang menyediakan berbagai jenis buku bagi jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan Umum. Di dalam Budi Kemdikbud, terdapat fitur yang memudahkan kita untuk memilih banyak tema dan bahasa yang terbagi dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Selain buku bacaan biasa, terdapat juga fitur untuk memilih format buku seperti buku komik, buku audio, dan buku video.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015. Sedikit berbeda dengan beberapa regulasi sebelumnya yang berbicara mengenai literasi dalam lingkup masyarakat secara umum, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015,



khususnya pada bagian VI mengatur kegiatan literasi dalam lingkup sekolah Sekolah baiknya memberikan fasilitas supaya peserta didik dapat mengembangkan dan menggali potensi mereka dengan maksimal. Aktivitas wajib: (1) sebelum pembelajaran wajib memakai waktu selama 15 menit membaca buku disamping buku ajar (setiap hari)...". Pada intinya, Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2015 bagian VI ini mencoba untuk membangun pembudayaan kegemaran membaca di tingkat sekolah.

Berikutnya, bahasa yang merupakan alat komunikasi juga berperan sebagai aspek penting dalam literasi. Maka dari itu, pemerintah menetapkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Bahasa NKRI yang berikutnya dinamakan dengan Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang dipergunakan di semua daerah NKRI.

Lebih lanjut perihal bahasa, terdapat Peraturan yaitu sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi pemersatu bangsa dan sebagai jati diri. Berikut yang dimaksud dengan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 pasal (1), (2), dan (3):

1. Pengembangan Bahasa merupakan usaha dalam melakukan modernisasi bahasa dengan meningkatkan kosakata, pengembangan laras bahasa, pembakuan dan pemantapan

sistem bahasa, serta mengusahakan penguatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia.

2. Pembinaan Bahasa merupakan usaha menguatkan pemakaian bahasa dengan aktivitas bahasa di seluruh jenjang dan jenis masyarakatan serta pendidikan bahasa ke semua tingkat masyarakat.
3. Pelindungan Bahasa merupakan usaha memelihara dan menjaga bahasa agar tetap lestari dengan pengembangan, penelitian, pengajaran, dan pembinaannya.

Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2015 mencanangkan sebuah program besar dalam rangka meningkatkan literasi bernama Gerakan Literasi Nasional (GLN). GLN adalah suatu usaha dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada abad ke-21 dengan menguatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang diperlukan dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia.

GLN menyusun enam macam literasi yang diperlukan saat ini antara lain, literasi baca tulis, numerasi, sains, keuangan, kewargaan, dan literasi digital. Keenam jenis literasi sebagai suatu gerakan disusun dengan tiga aspek, yaitu sekolah (Gerakan Literasi Sekolah), masyarakat (Gerakan Literasi Masyarakat), dan keluarga (Gerakan Literasi Keluarga) (Suwana; 2017). Di luar dari ketiga ranah tersebut, terdapat pula beberapa upaya dan program lain



yang diselenggarakan Kemendikbudristek dalam meningkatkan literasi antara lain ranah literasi digital, literasi bagi generasi muda, dan program literasi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

a) Gerakan Literasi Sekolah

Gerakan Literasi Sekolah ditujukan untuk mengembangkan pembudayaan literasi di sekolah selaku ranah pendidikan. Gerakan ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan berbagai program Gerakan Literasi sekolah dengan rangkaian aktivitas pembelajaran, baik di luar kelas atau dalam kelas. Oleh karenanya, aktivitas Gerakan Literasi Sekolah melibatkan guru, siswa, dan orang tua. (Syahidin; 2020)



Gambar 7. Tahapan Pelaksanaan GLS melalui Kegiatan 15 Menit Membaca Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek pada Tahun 2024 telah mencetak kemudian mengirimkan sejumlah 200 buku dan menyiapkan buku berbentuk digital melalui *website* perpustakaan daring budi.kemdikbud.go.id.



Gambar 8. Merdeka Belajar Eps. 23

Pendistribusian buku ini juga dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan terhadap guru, kepala sekolah, dan pustakawan supaya dapat memanfaatkan dan mengelola buku bacaan di sekolah yang telah didapatkan dari Kemendikbudristek dengan baik



Gambar 9. Merdeka Belajar Eps. 23: Pelatihan dan Pendampingan

b) Gerakan Literasi Masyarakat

Gerakan Literasi Masyarakat yaitu bagian dari Gerakan Literasi Nasional yang mencakup berbagai kegiatan literasi untuk masyarakat tanpa melihat usia. Tujuan dari Gerakan Literasi Masyarakat adalah untuk menjaga



kegiatan literasi dalam rangka pembangunan pengetahuan berjalan dengan terus berkelanjutan (Nadiroh, 2022). Apabila kita kontekstualisasikan dengan subbab regulasi literasi, Gerakan Literasi Masyarakat merupakan bentuk manifestasi dari pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang secara tegas menjelaskan, pembudayaan gemar membaca dilaksanakan melalui satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Kemudian secara rinci dijelaskan dalam PP nomor 24 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan UU Nomor 43 Tahun 2007. Di dalam aturan ini dijelaskan kembali secara lebih rinci standardisasi perpustakaan. Terkhusus dalam hal pembudayaan kegemaran membaca, tertulis secara tegas dalam pasal 74 yang menyebutkan bahwasanya pengembangan budaya gemar membaca dilaksanakan dengan penyediaan buku bermutu dan terjangkau, gerakan nasional gemar membaca, penyediaan perpustakaan di sarana publik, rumah baca, taman membaca, dan aktivitas lain yang serupa.

Dalam pratiknya, Gerakan Literasi Masyarakat ini lebih kepada berbentuk bantuan dan pembinaan kepada komunitas-komunitas yang bergerak di bidang literasi di Indonesia. *Pertama*, dilaksanakannya pemutakhiran profil komunitas penggerak literasi. Tujuan dari pemutakhiran profil komunitas literasi adalah untuk mengumpulkan data profil dan informasi komunitas-komunitas literasi di Indonesia. Dalam melakukan pengolahan data, KKLP

Literasi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek bekerja sama dengan Balai Bahasa/Kantor Bahasa di provinsi. Setelah mendapatkan data komunitas-komunitas literasi tim KKLP literasi memverifikasi, memvalidasi, dan mengklasifikasikan komunitas literasi ke dalam tiga kelompok. Kelompok tersebut yaitu kategori A, B, dan C.

Per tahun 2023, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra telah mendata 1.238 komunitas literasi di Indonesia yang sudah dikategorisasi. Berikut data yang sudah terkumpul.

Tabel 3. Kategorisasi Komunitas Literasi di Indonesia 2023

NO.	PROVINSI	KATEGORI			JUMLAH
		A	B	C	
1	ACEH	3	4	15	22
2	BALI	17	10	5	32
3	BANTEN	11	33	19	63
4	BENGKULU	5	32	11	48
5	DI YOGYAKARTA	21	34	11	66
6	GORONTALO	1	4	4	9
7	DKI JAKARTA	34	49	17	100
8	JAMBI	2	22	3	27
9	JAWA BARAT	10	42	0	52
10	JAWA TENGAH	3	34	17	54
11	JAWA TIMUR	4	36	3	43
12	KALIMANTAN BARAT	5	4	4	13
13	KALIMANTAN TENGAH	2	15	3	20
14	KALIMANTAN SELATAN	3	21	21	45
15	KALIMANTAN UTARA & KALIMANTAN TIMUR	0	12	7	19
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	16	6	23
17	KEPULAUAN RIAU	8	5	5	18
18	LAMPUNG	5	50	20	75
19	MALUKU	2	37	9	48
20	MALUKU UTARA	3	17	19	39
21	NUSA TENGGARA BARAT	7	6	20	33
22	NUSA TENGGARA TIMUR	6	18	31	55
23	PAPUA	0	6	6	12
24	PAPUA BARAT	1	8	4	13
25	RIAU	7	29	9	45
26	SULAWESI SELATAN & SULAWESI BARAT	10	11	15	36
27	SULAWESI TENGAH	11	17	9	37
28	SULAWESI TENGGARA	7	29	15	51

Kedua, dilaksanakannya pembinaan dan Banpem (Bantuan Pemerintah) untuk komunitas literasi di Indonesia. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek bekerja sama dengan balai bahasa provinsi untuk melaksanakan pembinaan komunitas literasi. Selanjutnya, pada tahun 2024, Kepala Badan Pengembangan dan



Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek telah menetapkan penerima Banpem untuk komunitas penggerak literasi. Tahun 2024 tercatat sebanyak 340 komunitas literasi yang akan menerima bantuan literasi dari Kemendikbudristek.

c) Gerakan Literasi Keluarga

Gerakan Literasi Keluarga ditujukan dalam menambah kemampuan literasi semua anggota keluarga. Pembudayaan literasi dalam lingkup keluarga sangat penting dalam menambah keterampilan peran keluarga. Keluarga harus menjadi tempat pertama anak belajar (Nadiroh, 2022).

Akan tetapi, Gerakan Literasi Keluarga ini tidak ada bentuk konkretnya seperti apa. Berbeda dengan Gerakan Literasi Masyarakat dan Gerakan Literasi Sekolah yang secara jelas ada programnya. Gerakan Literasi Keluarga ini apakah termasuk ke dalam Gerakan Literasi Masyarakat atau Gerakan Literasi Keluarga secara tersendiri. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai Gerakan Literasi Keluarga baik dari sisi pemerintah, maupun NGO selaku perwakilan masyarakat.

d) Pembinaan Literasi Generasi Muda

KKLP Literasi Kemendikbudristek menyelenggarakan Pembinaan Literasi Generasi Muda pada tahun 2023. Berbagai bentuk kegiatan literasi generasi muda adalah mengadakan ajang Duta Bahasa Nasional. Ajang Duta Bahasa Nasional diselenggarakan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa Kemendikbudristek. Secara keseluruhan, tujuannya yaitu dalam menambah peran generasi muda Indonesia untuk menambah kemampuan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan karakter dan daya saing bangsa di era Revolusi 4.0.

B. Metode *Historical Comparative* Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat

Perkembangan upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi dari masa ke masa dengan menentukan pengklasifikasian setiap periode di mulai dari masa pemerintah Orde Lama, hingga Pasca- Reformasi. *Historical Comparative* upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi dari masa ke masa di Indonesia ini dapat memberikan penjelasan historis upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi yang tentunya memiliki tantangan yang berbeda-beda di tiap era.

a) Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Literasi pada Masa Orde Lama (1945-1866)

Pada masa Orde Lama, jumlah penduduk Indonesia yakni 61 juta orang dengan 90 persennya mengalami buta huruf. Pada 14 Maret 1948, pemerintah mulai menyelenggarakan program literasi bernama Pemberantasan Buta Huruf (PBH) pada 14 Maret 1948 meskipun pada saat itu situasi masih



dalam darurat perang. Program Pemberantasan Buta Huruf dilaksanakan di sebanyak 18.663 tempat yang di dalamnya bekerja sama dengan sebanyak 17.882 guru dengan 761.482 siswa. Kemudian pelaksanaan secara swadaya Pemberantasan Buta Huruf yang diselenggarakan di sekitar sebanyak 881 tempat yang di dalamnya bekerja sama dengan sebanyak 515 orang guru dan 33.626 murid. Dari Program Pemberantasan Buta Huruf ini setidaknya pada tahun 1960-an dapat menurunkan 90 persen angka buta huruf menjadi 40 persen (Aksaramaya, 2023). Memang isu literasi yang menjadi fokus perhatian adalah masih banyaknya masyarakat Indonesia yang buta huruf (illiterate).

b) Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Literasi pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Angka buta huruf pada era Orde Baru masih dalam angka yang tinggi, walaupun menurun dibandingkan pada masa Orde Lama, terlebih ketika awal-awal kemerdekaan. Dengan demikian, program literasi dalam rangka menghapus buta huruf masih perlu diupayakan secara gencar.

Tabel 4. Angka Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Tahun 1971, 1980, 1990

Kelompok Umur	Tahun		
	1971	1980	1990
10—14	18,8	10,0	2,4
15—19	17,8	13,0	2,6
20—24	22,8	16,3	5,2
25—34	38,1	22,2	11,0
35—44	53,2	38,0	18,4
45+	68,8	60,2	52,6

Terdapat beberapa program literasi pada Masa Orde Baru. Adapun program literasi yang dilaksanakan yang pertama, adanya Program Paket ABC untuk memberantas buta huruf. Dilanjut pada tahun 1972 terdapat Program Aksarawan Fungsional. Program Aksarawan Fungsional ini sebetulnya juga sudah pernah dicanangkan pada masa Orde Lama. Kemudian pada masa akhir kepemimpinan Presiden Soeharto, diadakannya Bulan Buku Nasional.

Akan tetapi, sayangnya Rezim Orde Baru merupakan masa yang terbilang kelam bagi perkembangan literasi. Bagaimana tidak, terdapat pembungkaman kepada para penulis yang mengkritik pemerintah karena Rezim Orde Baru tidak menaruh minat kepada intelektualisme.

Hal ini dibuktikan dengan adanya krisis buku pada 1973. Pada fenomena tersebut, tidak ada satu pun buku yang terbit. Tidak seperti Program Pemberantasan Buta Huruf pada masa Orde Lama yang memobilisasi kegiatan pemberantasan secara besar-besaran, Program ABC ini justru lebih banyak mengandalkan birokrasi pemerintahan. Kemudian, Bulan Buku Nasional yang diadakan pada masa akhir jabatan Presiden Soekarno pun hanya sekadar program formalitas belaka (Permatasari, 2015).

c) Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Literasi pada Masa Reformasi (1998-2024)

Dalam konteks literasi, pada masa ini mulai bermunculan beberapa



sastrawan di antaranya Taufik Ismail, Joko Pinurbo, dan Seno Gumira Ajidarma. Sarana dan prasarana untuk membaca lebih mudah diakses dibandingkan era-era sebelumnya. Berikut data terbaru terkait angka buta huruf yang dilansir dari BPS (Badan Pusat Statistik).

KALIMANTAN TENGAH	0,9	0,88	0,97	0,09	0,08	0,1	2,45	2,5	2,45
KALIMANTAN SELATAN	1,73	1,64	1,63	0,15	0,24	0,12	4,29	4,2	3,92
KALIMANTAN TIMUR	1,1	1,03	0,99	0,14	0,24	0,06	2,8	2,59	2,53
KALIMANTAN UTARA	3,45	2,29	2,22	0,61	0,77	0,43	8,93	5,48	5,4
SULAWESI UTARA	0,2	0,19	0,21	0,09	0,07	0,04	0,35	0,34	0,42
SULAWESI TENGAH	1,72	1,95	1,86	0,67	0,58	0,4	3,62	4,57	4,35
SULAWESI SELATAN	7,51	6,69	6,17	1,71	1,77	1,12	16,8	15,1	13,76
SULAWESI TENGGARA	5,06	4,21	3,97	1,1	0,82	0,52	13,1	11,2	10,5
GORONTALO	1,25	1,58	1,51	0,28	0,6	0,55	2,97	3,41	3,06
SULAWESI BARAT	6,91	6,18	5,67	2,67	1,85	1,37	15,2	15,4	13,41
MALUKU	0,58	0,6	0,53	0,52	0,31	0,15	0,7	1,19	1,24
MALUKU UTARA	1,29	1,22	1,19	0,26	0,16	0,08	3,43	3,57	3,3
PAPUA BARAT	2,09	2,36	2,16	1,39	0,98	0,87	3,86	5,65	5,18
PAPUA	21,11	18,8	15,8	19	15,1	12,8	26,3	28,4	22,26
INDONESIA	3,96	3,65	3,47	0,73	0,75	0,47	9,24	8,48	8,04

Tabel 5. Angka Buta Aksara Menurut Provinsi dan Umur

38 Provinsi	Angka Buta Aksara Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (Persen)								
	15+			15-44			45+		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	1,76	1,75	1,66	0,06	0,13	0,13	5,32	4,96	4,61
SUMATERA UTARA	0,81	0,89	0,83	0,17	0,24	0,13	2,03	2,11	2,09
SUMATERA BARAT	0,74	0,71	0,69	0,1	0,12	0,07	1,92	1,7	1,74
RIAU	0,8	0,82	0,82	0,09	0,07	0,04	2,38	2,42	2,38
JAMBI	1,92	1,9	1,84	0,24	0,18	0,1	4,88	5,14	4,62
SUMATERA SELATAN	1,22	1,35	1,27	0,2	0,27	0,13	3,15	3,28	3,27
BENGKULU	2,12	2,2	2,11	0,16	0,25	0,09	5,63	5,87	5,41
LAMPUNG	2,72	2,75	2,67	0,11	0,28	0,31	7,09	6,91	6,35
KEP. BANGKA BELITUNG	1,9	1,83	1,76	0,64	0,42	0,25	4,19	4,52	4,26
KEP. RIAU	0,91	0,98	0,95	0,11	0,15	0,12	2,87	2,85	2,75
DKI JAKARTA	0,27	0,31	0,31	0,09	0,08	0,09	0,61	0,68	0,68
JAWA BARAT	1,38	1,51	1,49	0,12	0,13	0,07	3,56	3,93	3,74
JAWA TENGAH	6,21	5,74	5,66	0,25	0,74	0,29	14,1	12,8	12,43
DI YOGYAKARTA	4,78	4,85	4,41	0,07	0,22	0,28	10,9	10,3	9,68
JAWA TIMUR	7,44	6,68	6,3	0,94	0,94	0,41	15,6	14,3	13,32
BANTEN	2,22	1,84	1,77	0,14	0,33	0,07	6,16	4,86	4,54
BALI	5	4,47	4,39	0,09	0,4	0,25	12,1	9,92	9,86
NUSA TENGGARA BARAT	12,61	11	10,9	2,7	2,79	1,51	30,4	26,8	26,48
NUSA TENGGARA TIMUR	6,15	5,37	4,89	2,13	1,75	1,32	13,8	12,3	11,22
KALIMANTAN BARAT	6,59	6,04	5,21	1,43	1,46	0,59	16,5	14,9	13,42

Berdasarkan data tersebut, tergambar bahwa angka buta huruf makin menurun dari tiap provinsi dari usia 15+, 15 - 45, dan 45+. Akan tetapi, seiring berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, literasi bukan hanya diartikan sebagai kemampuan bacatulis saja.

Tantangan yang muncul pada masa reformasi pun bukan hanya tentang angka buta huruf, melainkan bagaimana seorang individu dapat mengolah informasi seiring informasi yang berdatangan pada masa sekarang dapat diakses dengan begitu mudahnya. Walaupun kondisi literasi di Indonesia saat ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia masih mengalami sejumlah problematika dalam literasi.

Pada tanggal 13 September 1999, Bachruddin Jusuf Habibie, Presiden Indonesia ketiga menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 1999 mengenai Dewan Buku Nasional. Keputusan Presiden ini ditetapkan karena adanya urgensi bahwa buku memiliki fungsi sebagai



sarana pendidikan, sumber informasi, dan bagi tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perihal ini seperti yang tertera pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kepres Nomor 110 Tahun 1999.

Akan tetapi, masa pemerintah Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, memutuskan untuk membubarkan sepuluh lembaga nonstruktural, salah satunya Dewan Buku Nasional. Tugas dan Fungsi dari Dewan Buku Nasional dialihkan kepada Kementerian Pendidikan. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Perpres Nomor 176/2014.

Selain itu, pada masa ini pemerintah mencanangkan sebuah program bernama GLN. Perihal ini adalah penerapan dari Peraturan mendikbud Nomor 23 Tahun 2015. GLN yaitu sebuah usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada abad ke-21 melalui penguapan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang diperlukan dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia. Gerakan Literasi Nasional menyusun enam jenis literasi yang diperlukan dalam abad ke-21 antara lain literasi sains, literasi baca tulis, literasi kewargaan, literasi numerasi, literasi digital, dan literasi finansial. Keenam jenis literasi ini dibuat dengan tiga aspek sebagai suatu gerakan. Gerakan Literasi Nasional pertama kali digaungkan tahun 2015, pada saat itu Menteri Pendidikan yang menjawab adalah Anies Baswedan. Kemudian Gerakan Literasi Nasional ini dilanjut dengan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy dan Nadiem Makarim.

Peningkatan literasi Masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan adalah parameter hasil pembangunan yang merata serta termasuk suatu penanaman modal bangsa untuk mengembangkan SDM. (Iman Surya dkk, 2021)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari segi upaya literasi, program literasi di Indonesia antara lain Gerakan Literasi Masyarakat, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, dan pembinaan literasi terhadap generasi muda. Membahas melalui *historical comparative*, Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan literasi pembabakannya terdiri atas masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dari masa ke masa, secara umum menunjukkan perkembangan yang baik. Terlihat dari angka buta huruf yang makin menurun berdasarkan data dari BPS.

Dari segi regulasi literasi, di Indonesia mendefinisikan makna literasi secara jelas, terdapat pula literasi mengenai pembudayaan kegemaran membaca. Dari segi program literasi, Pemerintah Indonesia memiliki program literasi yang bersifat nasional dan masif, yakni Gerakan Literasi Nasional. Pemerintah Indonesia pun meluncurkan *website* perpustakaan *daring* yang menyediakan fitur jenis bacaan dan bahasa, yakni Budi (Buku Digital) Kemdikbud serta adanya pembinaan literasi bagi generasi muda.



Saran

Dalam upaya meningkatkan literasi, di Indonesia pada Gerakan Literasi Sekolah khususnya program wajib membaca buku 15 menit sebelum aktivitas pembelajaran tidak lagi hanya sebatas kegiatan rutin yang tidak menyentuh substansinya. Gerakan Literasi Masyarakat khususnya kegiatan studi banding antarkomunitas literasi harus dihidupkan kembali. Lalu pada Gerakan Literasi Keluarga, diperkuat kejelasan mengenai bentuk konkret dari programnya. Permasalahan budaya membaca yang belum menjadi hal penting bagi masyarakat, harga buku yang mahal, dan sosialisasi yang belum menyentuh masyarakat pelosok, dapat digalakan dengan melibatkan pihak lain di luar pemerintah, tidak hanya pihak sekolah, tetapi juga komunitas-komunitas di masyarakat dari mulai Tingkat paling rendah yaitu desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. (2021). Indeks Aktivitas Literasi Membaca Peserta Didik Dan Prestasi Akademik: Studi Korelasi Pada 34 Propinsi Di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)*, 4(2), 64-71.
- Anggraeni, P. R. (2019). Implementasi Kebijakan Literasi Sekolah guna Peningkatan Karakter Gemar Membaca. *IJDSSED*. 1 (2). 132-142
- Dewi Utama Faizah. (2016). *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar*. (Jakarta:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DSE/CEOV, *Keys to Life, Professional Development Program for Secondary Subject Teachers*. (Melbourne: Department of School Education/Catholic Education of Victoria, 1994), page 329.

Herdiansyah, Dendy & Kurniati, Poni. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan sebagai Penunjang IPM Kota Bandung. *Jurnal Agregasi*, 8 (1). 43-50

Irianto, P.O & Febrianti L.Y. (2017). *Pentingnya Penguasaan Literasi Bagi Generasi Muda dalam Menghadapi MEA*. In *Proceedings Education and Language International Conference* (Vol. 1 No.1). 640-647

Kemendikbud. (2016). *Menumbuhkan Gerakan Literasi di Sekolah*. Retrieved from [Menumbuhkan Gerakan Literasi di Sekolah | Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kemendikdasmen](#)

Mariana, D., Yuningsih, N. Y., & Paskarina, C. (2007). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Miller, John W and Michael M. McKenna. (2016). *World Literacy: How Countries Rank and Why It Matters*: (New York: Routledge)

Rusydiah, E. F., Tamin, Z., & Rahman, M. R. (2023). *Literacy Policy in Southeast Asia: A Comparative Study between Singapore,*



- Malaysia, and Indonesia. CEPS Journal*. 13(2). 79-96
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Iman. Budiman, dkk. (2021). Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Pendidikan di Perbatasan Kalimantan. *Jurnal Agregasi*, 9 (1). 1-23
- Suwana, F. (2017). *Empowering Indonesian women through building digital media literacy. Kasetsart Journal of Social*
- Syahidin. (2020). Meningkatkan Minat Membaca Melalui Gerakan Literasi Sekolah. *Asatiza Jurnal Pendidikan*. 1 (3). 373-380
- Syahrin, S. (2021). *Literacy Uses and Practices of Schoolchildren Living in a Contemporary Malaysian Context . Australian Journal of Teacher Education*. 46 (Issue 10). Article 3. 43-61
- UNESCO. (2023). 11 February 2023. *What You Need to Know About Literacy*. Retrieved from [Literacy: what you need to know](#)
- dosen pada Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, dan juga menjabat sebagai Pusat Studi Manajemen Pemerintahan Lokal dan Desa.
- Penulis Kedua, Salsabila kelahiran Bandung, 20 Desember 2001 merupakan lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Tahun 2024.
- Penulis ketiga, Susi Yulianti, Kelahiran Tasikmalaya, 9 Maret 1998 merupakan mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIP, Unpad

Profil Singkat

Penulis utama artikel ini Neneng Yani Yuningsih, kelahiran 28 Desember 1975 di Kota Tasikmalaya. Jenjang Pendidikan yang ditempuh, Strata 1 Ilmu Pemerintahan Unpad lulus Tahun 2000; Strata 2 Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia lulus tahun 2004; dan Strata 3 Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia lulus tahun 2016. Aktivitas akademik saat ini sebagai

